

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Teori	19
2.1.1 Teori Negara Hukum	19
2.1.2 Teori Kewenangan	23
2.1.3 Teori Pembagian Kekuasaan Negara	30
2.1.4 Teori Keadilan	35
2.2 Tinjauan Konseptual	40
2.2.1 Pengertian Lembaga Negara	40
2.2.2 Kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Mengawasi Hakim di Peradilan Umum	42
2.2.3 Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	46

2.2.4 Pengertian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	50
BAB III	55
METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Jenis Data	57
3.3 Cara Pengumpulan Data	60
3.4 Jenis Pendekatan	60
3.4.1 Pendekatan terhadap asas-asas hukum	61
3.4.2 Pendekatan terhadap sistematika hukum	61
3.4.3 Pendekatan terhadap sinkronisasi hukum (horizontal dan vertikal)	61
3.4.4 Pendekatan terhadap perbandingan hukum	61
3.4.5 Pendekatan terhadap kasus hukum	62
3.5 Analisis Data	64
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	66
4.1 Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim dalam Menerapkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Terhadap Perilaku Indisipliner Hakim Peradilan Umum di Indonesia	66
4.2 Hasil Penelitian Tentang Upaya Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Atas Pemberhentian Tidak Hormat Hakim DA	72
BAB V	84
KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN 1	94
LAMPIRAN 2	97

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Tabel Laporan Hukuman Disiplin Tahun 2022
- Gambar 2 : Dokumentasi wawancara dengan Dr. M. Taufiq HZ, M.HI
(Wakil Ketua Komisi Yudisial Januari 2021-Juni 2023)
- Gambar 3 : Dokumentasi wawancara dengan Soesilo, S.H., MH (Hakim
Agung Kamar Pidana pada Mahkamah Agung)



DAFTAR SINGKATAN



MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MA	: Mahkamah Agung
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
KY	: Komisi Yudisial
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MKH	: Majelis Kehormatan Hakim
BNN	: Badan Narkotika Nasional
KEPPH	: Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim
IKAHI	: Ikatan Hakim Indonesia
BAWAS	: Badan Pengawas
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
POLHUKHANKAM	: Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan